

SUBBAG HUMAS DAN TATA USAHA
BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat

Berita	: Tekan Penyimpangan Lewat Aplikasi E-Pokir
Entitas / Cakupan	: Kabupaten Bandung
Sumber / Hal	: Pikiran Rakyat / Hal.21
Edisi	: Kamis, 28 juni 2018

Tekan Penyimpangan
Lewat Aplikasi E-Pokir

SOREANG, (PR).-

Pemerintah dan DPRD Kabupaten Bandung menggunakan aplikasi e-Pokir (Pokok Pikiran Elektronik) untuk meminimalkan penyimpangan dalam perencanaan dan penganggaran APBD. Aplikasi ini akan diisi masing-masing anggota legislatif sebagai penyampaian aspirasi dari masyarakat secara daring kemudian ditindaklanjuti badan anggaran (bangar) untuk di ajukan kepada eksekutif dalam perencanaan APBD.

"Meskipun belum terinteg-rasi dengan aplikasi SIMDA Perencanaan dan SIMDA Ke-uangan, langkah ini merupakan komitmen pemkab dengan DPRD untuk meminimalkan penyimpangan," ungkap Bupati Bandung Dadang M Naser, Se-lasa (26/6/2018).

Aplikasi e-Pokir sesuai anjuran KPK agar semua kegiatan pemerintah dan DPRD termasuk penyampaian aspirasi harus berbasis teknologi. "Aspi-rasi anggota DPRD harus terbuka dan terencana sejak awal. Lima bulan sebelumnya aspi-rasi masyarakat itu harus sudah tergambar. Tak boleh ujung-ujung ada aspirasi, aplikasi ini transparan dan warga bisa membaca," katanya.

Selama ini dalam musren-bang (musyawarah perencanaan dan pengembangan) kerap

kali berbeda dengan aspirasi saat reses dewan. Padahal menurut Dadang, idealnya harus seiring dan seirama. Penyimpangan yang rentan terjadi adalah dalam hal hibah bantuan sosial (bansos). "Masyarakat juga harus diberi pemahaman bahwa semua tidak bisa ter-jawab dengan anggaran yang kita miliki (APBD). KPK menyarankan agar tidak dianggar-kan lagi hibah bansos karena membuka peluang terjadinya penyimpangan," ujarya.

Di Kabupaten Bandung, hi-bah bansos tidak bisa serta merta dihilangkan. Hibah ban-sos, bisa digantikan program yang terencana dengan baik. "Kita belum bisa menghilang-kan hibah sekaligus, mesti bertahap. Yang penting teren-cana dilihat mana yang lebih fokus dan berkualitas hibah-nya, dan perencanaannya ter-buka dengan aspirasi melalui e-Pokir ini. KPK tadi menyar-ankan mengganti hibah itu ke program yang sejak awal teren-cana," katanya.

Dalam dana hibah ini, kata Dadang, ada dua kemungkinan penyimpangan. Bisa dilakukan oleh kepala daerah dan jajaran-nya maupun wakil rakyat. "Dengan e-Pokir ini aspirasi rakyat bisa terakomodasi den-gan baik yang tentunya sesuai dengan prioritas pembangun-an," ucapnya. (Sarnapi)***